

DISERTASI

**KEMISKINAN SEUMUR HIDUP: SEBUAH ANALISIS FAKTOR SOSIO-
KULTURAL INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA MASYARAKAT NELAYAN
DI KOTA GORONTALO**



LUKMAN KASIM

NIM E023192019

**PROGRAM DOKTOR ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**KEMISKINAN SEUMUR HIDUP (SEBUAH ANALISIS FAKTOR
SOSIO-KULTURAL INTERNAL DAN EKSTERNAL PADA
MASYARAKAT NELAYAN DI KOTA GORONTALO)**

Disusun dan diajukan oleh

LUKMAN KASIM

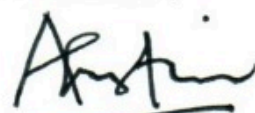
E023192019

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 20 Juli 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui
Promotor,


Prof. Dr. Munsil Lampe, MA
NIP. 195612271986121001

Co. Promotor,


Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.
NIP. 196112271988111002

Ketua Program Studi
Antropologi,

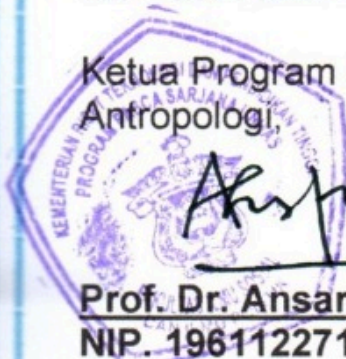

Prof. Dr. Ansar Arifin, MS.
NIP. 196112271988111002

Co. Promotor,


Dr. Tasrifin Tahara, M.Si
NIP. 197508232002121002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Dr. Phil. Sukri, SIP, M.Si
NIP. 197508182008011008



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lukman Kasim
Program Studi : Ilmu Antropologi
Nomor Induk Mahasiswa : E023192019
Alamat : Jl. Jambu Kelurahan Libuo
Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa disertasi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali jika kutipan substansi disebutkan sumber pustakanya dan tidak pernah diajukan oleh seseorang, saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan norma ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makassar, 6 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Lukman Kasim

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada kehadiran Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, karena hanya dengan limpahan Rahman, Rahim dan KaruniaNya, maka disertasi yang berjudul: “**Kemiskinan Seumur Hidup (Sebuah Analisis Faktor Sosio-Kultural Internal dan Eksternal pada Masyarakat Nelayan di Kota Gorontalo)**” ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada sang pelita kehidupan, penyibak kabut kegulitaan, penerang jalan menuju Ilahi, manusia paripurna, revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah hingga akhir zaman, semoga kita mendapatkan syafaat dari Baginda Rasulullah di *yaumul qiyamah* nanti.

Penelitian dalam disertasi ini adalah sebuah karya etnografi tentang potret kemiskinan nelayan, sebuah segmen kehidupan masyarakat kecil ditengah proses pembangunan di Kota Gorontalo. Sebuah narasi tentang mengapa mereka hidup miskin dan bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi miskin, terjawab dalam narasi akademik yang terangkum dalam disertasi ini.

Sebagai penulis saya menyadari bahwa dalam penulisan disertasi ini, masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, sebagaimana hakiknya manusia yang *dhoif* dan tak luput dari setumpuk keterbatasan. Tidak sedikit *aral-merintang* yang dihadapi karena keterbatasan pengetahuan yang peneliti

miliki. Namun semua itu hanya sebuah proses dan akhirnya bisa terlewati berkat usaha, harapan, bantuan, bimbingan, kritik, saran, bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat mendalam kepada semua pihak sehingga saya bisa menyelesaikan studi pada Program Doktor Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin Makassar. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat mendalam terutama peneliti sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc selaku Rektor Universitas Hasanudin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada saya menyelesaikan studi pada program Doktor Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Ariestina Pulubuhu, MA selaku mantan Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberi ruang kepada saya dalam menempuh studi pada program Doktor Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Phil Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA selaku Promotor yang dengan sabarnya membimbing dan mengarahkan secara akademik baik dalam dalam perspektif teori dan matodologi dalam ilmu Antropologi selama menyelesaikan disertasi ini.

5. Bapak Prof. Dr. Ansar Arifin, MS, selaku Ko-Promotor I dan Ketua Program Studi Doktor Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah dengan tekun dan sabar melakukan proses pembimbingan secara akademik terutama dalam memahami kemiskinan nelayan sebagai tema sentral dalam disertasi ini.
6. Bapak Dr. Tasrifin Tahara, M.Si selaku Ko-Promotor II yang telah memberi masukan dan bimbingan yang tak kenal waktu berdiskusi selama proses pembimbingan hingga selesainya disertasi ini.
7. Bapak Dedi Supriadi Adhuri, MA, PhD selaku Penguji Eksternal dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) selaku penguji eksternal yang selama ini konsen dalam penelitian kemaritiman yang telah memberikan masukan yang konstruktif demi perbaikan-perbaikan dalam disertasi ini.
8. Tim penguji disertasi Bapak Prof Dr Hamka Naping, MA, Bapak Prof. Dr. H. Mahmud Tang, MA, dan Bapak Dr Muhammad Basir, MA yang telah banyak memberi masukan dan kritik yang konstruktif secara akademik sehingga disertasi ini bisa maksimal sebagai sebuah karya akademik dalam Program Doktor Antropologi.
9. Dosen-dosen saya Bapak Prof. Dr. Pawennari Hijjang, MA, Ibu Prof Nurul Ilmi Idrus, MSc, PhD, Bapak Prof Dr. Supriadi Hamdat, MA, Bapak Dr. Yahya, MA, dan Bapak Dr. Safriadi, M.Si yang telah banyak berkontribusi dalam mentransformasi ilmu selama proses Pendidikan sehingga saya bisa memahami Ilmu antropologi baik dalam perspektif teori, metodologi dan karya-karya etnografi yang cukup berharga dalam dunia akademik.

10. Bapak Dr. H. Marten A. Taha, SE, M.Ec.dev selaku Walikota Gorontalo yang telah memberikan izin kepada saya sebagai staf pada Pemerintah Kota Gorontalo untuk menempuh studi pada Program Doktor Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
11. Bapak Rian F Cono, B.com, M.AP selaku Wakil Walikota Gorontalo yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya selama proses Pendidikan hingga saya menyelesaikan studi.
12. Bapak Dr. H. Ismail Madjid, MTP selaku Sekretaris Daerah Kota Gorontalo yang memberikan dukungan dan *support* kepada saya selama proses studi hingga saya menyelesaikan studi.
13. Seluruh informan saya di Kelurahan Laeto Selatan dan Kelurahan Laeto Utara Kecamatan Dumbo Raya yang selama ini banyak membantu dengan penuh keterbukaan memberikan informasi tentang tema-tema budaya selama saya melakukan penelitian.
14. Bapak Ir. Abubakar Luwiti selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gorontalo beserta seluruh jajaran yang telah membantu selama proses penelitian terkhusus data-data atau dokumen tentang perikanan dan kelautan dalam wilayah Kota Gorontalo.
15. Bapak Ir. Hamka Hamid selaku Kepala Kantor PPI Tenda Provinsi Gorontalo yang telah membantu memberikan informasi selama saya melakukan penelitian lapangan.

16. Terkhusus kepada Ayahanda saya tercinta Bapak Rahman A. Kasim dan Ibunda Hidjrah M. Nggilu yang telah melahirkan dan membesarkan saya serta selalu mendoakan saya dalam menapaki hidup meraih kesuksesan.
17. Bapak/Ibu Para Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Jajaran Pendidikan di Kota Gorontalo yang selama ini telah memberikan dukungan moril dan materi atas penyelesaian studi saya.
18. Terkhusus yang paling utama istri saya tercinta Ester Amin dan putra putri saya terkasih Awaludin Kasim Mowuu, Endah Sri Mulyani dan Indah Dwi Pratiwi yang selama ini tidak henti-hentinya mendoakan dan mendukung ayahnya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selama saya menempuh proses pendidikan.

Semua saran, kritikan dan pikiran-pikiran yang menjadi bahan masukan yang telah diberikan dalam perbaikan dan penyempurnaan penyusunan disertasi ini, peneliti doakan semoga menjadi amal ibadah dan beroleh pahala, berkah dan rahmat dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 6 Juli 2022

Penulis,

Lukman Kasim

ABSTRAK

Lukman Kasim. Kemiskinan Seumur Hidup (Sebuah Analisis Faktor Sosio-Kultural Internal dan Eksternal pada Masyarakat Nelayan di Kota Gorontalo). Dibimbing oleh Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA; Prof. Dr. Ansar Arifin, MS; Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.

Penelitian bertujuan untuk 1) mengklasifikasi dan menguraikan dimensi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan, 2) menggambarkan strategi yang dikembangkan oleh nelayan sebagai respon budaya dalam mengatasi persoalan kemiskinan, 3) menjelaskan faktor-faktor sosial budaya internal dan eksternal yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan adalah nelayan, pemilik perahu, aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gorontalo, penyuluh perikanan, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gorontalo, kepala kelurahan. Data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder bersumber dari jurnal dan buku yang diterbitkan secara online dan cetak. Analisis data dilakukan dengan cara menyalin data, membaca keseluruhan data, menganalisis secara detail dan mendeskripsikannya secara holistik-integratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, wawasan ekonomi yang rendah, keterbatasan teknologi dan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam organisasi nelayan berkonsekuensi pada kondisi kemiskinan nelayan. Kedua, respon budaya untuk mengatasi kemiskinan nelayan yaitu masih berperilaku mengeksploitasi laut tanpa batas. Ketiga, secara internal, faktor sosio kultural yang mempengaruhi kemiskinan nelayan yaitu nelayan masih menganut budaya boros, tidak memiliki etos kerja dan apatis. Secara eksternal, kemiskinan nelayan terjadi karena nelayan masih diperhadapkan dengan ketergantungan pemasaran dan program pemerintah belum efektif dan efisien sehingga organisasi nelayan belum kuat untuk mengentaskan kemiskinan.

Kata Kunci: Nelayan, Dimensi Kemiskinan, Sosio Kultural Internal dan Eksternal.



ABSTRACT

Lukman Kasim. Life time Poverty (An Analysis of Internal and External Socio-Cultural Factors in Fishing Communities in Gorontalo City). Supervised by Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA; Prof. Dr. Ansar Arifin, MS; Dr. Tasrifin Tahara, M.Sc.

The research aims to 1) classify and describe the dimensions of poverty experienced by fishing communities, 2) describe the strategies developed by fishermen as a cultural response to overcoming poverty problems, 3) explain internal and external socio-cultural factors that influence the occurrence of sustainable poverty.

This research uses a qualitative method. Informants are fishermen, boat owners, officers from the Gorontalo City Maritime and Fishery Service, fishery extension workers, employees of the Gorontalo City Marine and Fisheries Service, and village heads. Primary data was obtained by means of observation, in-depth interviews and Focus Group Discussion (FGD). Secondary data is sourced from journals and books published online and in print. Data analysis was carried out by copying the data, reading the entire data, analyzing it in detail and describing it holistically-integratively.

The results of the study show that, first, low economic insight, limited technology and profit-sharing systems applied in fishermen's organizations have consequences for fishermen's poverty conditions. Second, the cultural response to overcome fishermen's poverty is that they still behave in exploiting the sea without limits. Third, internally, socio-cultural factors that affect fishermen's poverty, namely fishermen still adhere to a wasteful culture, do not have a work ethic and are apathetic. Externally, fishermen's poverty occurs because fishermen are still faced with dependence on marketing and government programs have not been effective and efficient so fishing organizations are not strong enough to eradicate poverty.

Keywords: Fishermen, Poverty Dimensions, Internal and External Socio-Cultural.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Masalah Penelitian	18
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Hasil Penelitian	19
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Masalah Umum yang Dihadapi Nelayan	21
B. Dimensi Kemiskinan Masyarakat Nelayan	29
C. Faktor-Faktor Sosial Budaya Internal dan Ekseternal yang Menyebabkan Kemiskinan Nelayan Berkelanjutan	36
1. Faktor Ekonomi	37
2. Faktor Sosial	45
3. Faktor Budaya	49
4. Faktor Demografi	55
D. Strategi Bertahan Hidup	59
E. Kerangka Konseptual	61

BAB III.	METODOLOGI PENELITIAN	64
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	64
B.	<i>Setting</i> Lokasi Penelitian	65
C.	Teknik Penentuan Informan Penelitian	69
D.	Teknik Pengumpulan Data	69
E.	Membuat Catatan Lapangan (<i>Fieldnote</i>)	73
F.	Teknik Validasi dan Analisa Data	74
G.	Etika Penelitian	76
BAB IV.	KOMUNITAS NELAYAN DI KOTA GORONTALO SEBAGAI <i>SETTING</i> LOKASI PENELITIAN	79
A.	Letak, Wilayah dan Penduduk Kota Gorontalo	79
B.	Potensi Perikanan Gorontalo	81
C.	Komunitas Nelayan di Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan	92
1.	Sejarah Kelurahan Leato Utara dan Leato Selatan	92
2.	Keadaan Geografi dan Iklim	94
3.	Keadaan Demografi	95
4.	Mata Pencarian Penduduk	96
5.	Sarana Prasarana Wilayah	97
6.	Kondisi Pendidikan	101
7.	Sistem Kekerabatan.....	103

BAB V.	DIMENSI KEMISKINAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP	
	NELAYAN MISKIN	106
	A. Eksistensi Kelembagaan Nelayan	106
	B. Peralatan Penangkapan Ikan Sederhana	114
	C. Rumah Sederhana dengan Perabotan yang Minim	116
	D. Pendapatan yang Minim.....	119
	E. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari	123
	F. Kurang Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.....	125
	G. Rendahnya Partisipasi di Bidang Keagamaan	128
	H. Miskin Seumur Hidup dan Mewariskan Kemiskinan.....	132
	I. Bertahan Hidup dengan Kondisi Miskin	139
	1. <i>Ma Pilomonu Liyo Mayi</i>	140
	2. Menerima Bantuan Pemerintah	146
	3. Menjadi Tukang Bentor sebagai Alternatif Pekerjaan	152
BAB VI.	FAKTOR SOSIAL BUDAYA INTERNAL TERHADAP PENYEBAB	
	KEMISKINAN NELAYAN KOTA GORONTALO	155
	A. Wawasan Ekonomi Yang Rendah	155
	B. Ketergantungan pada Struktural	172
	C. Berdamai dengan Kehidupan Miskin	182
	D. Peningkatan Penduduk yang Pesat	190

BAB VII. FAKTOR SOSIAL BUDAYA EKSTERNAL TERHADAP PENYEBAB KEMISKINAN NELAYAN KOTA GORONTALO	203
A. Kondisi Lingkungan Laut yang Mempersulit Penangkapan	203
B. Pemasaran Hasil Tangkapan	221
C. Kebijakan Pemerintah yang Belum Berpihak pada Nelayan ..	236
D. Distribusi Hasil yang Tidak Adil pada Organisasi Nelayan	256
 BAB VIII. ANALISIS SOSIO- KULTURAL PENYEBAB KEMISKINAN NELAYAN DI KOTA GORONTALO.....	275
A. Pengantar	275
B. Miskin Sudah Menjadi Budaya	277
C. Relasi Nelayan sebagai Pertukaran Sosial.....	278
D. Ketidakberdayaan dalam Organisasi Nelayan	285
E. Kelembagaan Nelayan yang tidak Berpihak pada Nelayan Kecil.....	288
F. Kondisi Lingkungan Laut sebagai Arena Ekonomi	291
G. Kemiskinan Seumur Hidup	295
 BAB VII. PENUTUP.....	299
A. Kesimpulan.....	299
B. Saran-Saran	309
 DAFTAR PUSTAKA	313

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kecamatan dan Jumlah Wilayah Kelurahan Kota Gorontalo .	80
Tabel 2.	Jenis-Jenis Ikan Tangkapan Nelayan Kota Gorontalo	82
Tabel 3.	Daftar Harga Ikan Berdasarkan Musim di Kota Gorontalo	84
Tabel 4.	Potensi Perikanan Kota Gorontalo Tahun 2016-2021	88
Tabel 5.	Tingkat Pendidikan penduduk di Lokasi Penelitian	102
Tabel 6.	Kondisi Nelayan Miskin di Lokasi Penelitian	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Wilayah Gorontalo dalam Peta Indonesia	66
Gambar 2	Peneliti Melakukan Penelitian Lapangan	68
Gambar 3	Wawancara dengan Informan	71
Gambar 4	Jenis-jenis Alat Tangkap	99
Gambar 5	Jenis-Jenis Kapal/Perahu	100
Gambar 6	Diagram Model Bagi Hasil	108
Gambar 7	Kondisi Perumahan Nelayan	117
Gambar 8	Mesjid Al Muhajirin Laeto Utara dan Mesjid Al Munawah Laeto Selatan	129
Gambar 9	Tukang Bentor Sebagai Pekerjaan Alternatif	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika kemiskinan yang melanda kehidupan masyarakat di berbagai negara seperti yang terjadi di benua Afrika dan Kawasan Asia Tenggara, hingga saat ini masih terus menjadi sebuah persoalan krusial dihadapi oleh negara-negara di kawasan tersebut. Di beberapa negara termasuk negara Indonesia sendiri, realitas penanganan kemiskinan telah menguras energi yang tidak sedikit untuk menggiring masyarakat miskin menuju pada sebuah kondisi kesejahteraan yang diinginkan. Karakteristik permasalahan kemiskinan cakupannya sangat luas dan kompleks yang terindikasi melalui faktor kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan faktor demografi (Chambers. 1983).

Kondisi kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang itu telah melingkupi semua segmen masyarakat, bukan saja pada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, melainkan juga telah menjangkau kehidupan masyarakat di semua kawasan, termasuk kawasan pesisir pantai dimana terdapat komunitas nelayan yang jumlahnya relatif cukup banyak. Menghadapi realitas kehidupan masyarakat seperti ini, banyak diantara negara-negara berkembang harus kehilangan energi yang cukup besar untuk mengatasi kondisi kemiskinan

dengan berbagai ciri dan karakteristik yang melatarinya baik dari dimensi ekonomi, sosial, budaya dan demografi yang mewarnai dinamika kemiskinan masyarakatnya. Selain itu permasalahan-permasalahan tersebut telah mendorong hadirnya Badan-Badan Internasional seperti WHO, UNESCO dan UNICEF turut memberi kontribusi terhadap penanganan kemiskinan yang terjadi di kawasan tersebut dengan berbagai bentuk intervensi program untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat miskin (Nasdian, 2009).

Berkenaan dengan kompleksnya permasalahan kemiskinan ini, maka salah satu segmen masyarakat yang sering mengundang perhatian banyak kalangan adalah masyarakat nelayan. Di beberapa negara seperti di Afrika dan Asia Tenggara lebih khusus negara Indonesia, kehidupan masyarakat nelayan secara umum berada dibawah garis kemiskinan. Di dalam entitas masyarakat nelayan, pada umumnya nelayan yang dikatakan miskin adalah nelayan perorangan dan buruh nelayan. Oleh karena kedua jenis kelompok nelayan itu jumlahnya mayoritas, maka citra tentang kemiskinan melekat pada kehidupan nelayan secara umum. Sehingga itu bagaimanapun bentuk dan profil masyarakat nelayan, dalam banyak aspek mereka tetap dikatakan kelompok masyarakat yang miskin, meskipun tidak semua diantara individu-individu nelayan itu adalah miskin.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang tergolong miskin (Mubyarto, 1984; Imron, 2001; Masyhuri, 1999; Kusnadi, 2002). Bahkan menurut Retno dan

Santiasih (1993), jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain di sektor pertanian, nelayan (terutama buruh nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin, walaupun tidak dapat dikatakan semua nelayan itu miskin. Citra kemiskinan nelayan yang demikian itu sesungguhnya suatu hal yang sangat ironis, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, lebih luas daripada wilayah darat yang mengandung kekayaan sumber daya laut yang melimpah. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan hidup nelayan dan keluarganya (Imron, 2003).

Secara umum dapat dipahami, bahwa kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat atau individu untuk melaksanakan dan membawakan hidupnya sampai pada suatu taraf yang dianggap layak. Dalam tinjauan dimensi kehidupan ekonomi, kemiskinan nelayan tersebut sangat mudah dilihat dengan ukuran yang sederhana yaitu terkait dengan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar manusia, dimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Dengan tidak tersedianya modal usaha dan ketidakmampuan nelayan dalam mengelola dan mengembangkan usaha kelautan menjadi fenomena tersendiri yang melilit kehidupan nelayan. Demikian pula ketersediaan sarana prasarana pendukung tempat pemasaran serta konektifitas usaha dengan jaringan pemasaran serta peranan lembaga-

lembaga ekonomi rakyat sebagaimana yang sering dijumpai pada nelayan perdesaan, tampaknya telah banyak mengundang permasalahan dimana posisi masyarakat nelayan harus terpaksa menjual hasil-hasil laut mereka secara mandiri tanpa harus ditopang oleh potensi sumber daya lainnya. Akibatnya adalah hasil usaha mereka relatif cukup kecil dan tidak cukup untuk pengembangan modal dalam usaha kenelayanan.

Ketidakterdayaan masyarakat nelayan sebagaimana dalam realitas kehidupan ekonomi tersebut tidak hanya berlangsung pada buruh nelayan yang tergabung dalam kelompok-kelompok usaha, melainkan juga kondisi yang serba tidak berdaya ini melingkupi pula kehidupan masyarakat nelayan pinggiran (*tradisional*) yang berusaha secara mandiri (Dahuri, 2010). komunitas nelayan pinggiran sebagian besar mereka hidup dengan segala kekurangan dan keterbatasan baik sandang, pangan, perumahan dan kesehatan. Aktifitas mereka dalam melaut atau menangkap ikan sangat dominan belum beorientasi pada upaya mengembangkan dan meningkatkan usaha yang lebih luas, melainkan hanya sekedar memenuhi kebutuhan keluarga setiap harinya. Eksistensi komunitas nelayan seperti ini sangat rentan dengan kemiskinan yang tercermin melalui kondisi keluarga mereka yang hidup diliputi dengan ketidakberdayaan.

Deskripsi tentang permasalahan kemiskinan nelayan dapat dicermati pula melalui beberapa aspek kehidupan sosial yang ditunjukkan melalui dinamika aktifitas sosial masyarakat yang hidup di sepanjang

pesisir pantai. Beberapa diantaranya termanifestasi melalui kondisi nelayan dalam menghadapi sistem bagi hasil dan dominasi patron terhadap klien (*pemilik modal*), relasi sosial dibidang kenelayanan yang menuntut kemampuan untuk meyakinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil laut, fluktuasi harga di pasaran yang timbul akibat sentimen pasar yang berlebihan, hadirnya tengkulak dan adanya kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada nelayan. Sementara itu dalam kehidupan melaut, para nelayan seringkali dihadapkan dengan kondisi alam yang tidak menentu seperti terjadinya musim angin timur yang memaksa nelayan tidak dapat melakukan aktifitas melaut. Keadaan cuaca yang buruk disertai dengan gelombang laut yang tinggi mengharuskan para nelayan menghentikan semua aktifitas mereka dalam menangkap ikan. Selanjutnya di banyak tempat sering terdengar, ketersediaan sumber daya laut semakin berkurang yang diakibatkan oleh eksploitasi yang berlebihan, pencemaran lingkungan serta tidak adanya budidaya di sepanjang kawasan pesisir. Kondisi ini semakin memposisikan kehidupan nelayan kehilangan kesempatan dalam berusaha sehingga tidak heran banyak diantara mereka yang menjalani kehidupan secara apa adanya. Dengan begitu kuatnya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan ini, banyak diantara mereka harus terpaksa merubah profesi dengan meninggalkan usaha melaut untuk sementara waktu guna mencari alternatif usaha lain seperti bekerja secara serabutan di kawasan perkotaan. Usaha ini mereka lakukan sebagai

jawaban atas desakan kebutuhan keluarga yang demikian kuat, belum lagi mereka harus memenuhi tuntutan kebutuhan anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan.

Sementara itu di beberapa tempat sering dijumpai bahwa fenomena kemiskinan telah bergeser kedalam persoalan budaya dan telah melembaga menjadi sebuah sistem budaya yang tertanam begitu kuat di alam pikiran dan perilaku masyarakat. Fenomena ini terlihat pada beberapa aspek seperti penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang relatif sangat rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan. Disamping itu pemanfaatan alat tangkap ikan yang umumnya masih bersifat tradisional, belum lagi gaya hidup masyarakat nelayan yang terkadang melupakan bahwa "*hidup bukan sehari*" meskipun mereka sadar bahwa laut tidak selamanya menjanjikan kehidupan yang sejahtera karena banyak faktor tantangan yang mereka harus hadapi dalam aktifitas melaut. Realitas ini memperlihatkan sebuah kondisi bahwa masyarakat nelayan memang agak berbeda dengan komunitas masyarakat lain di wilayah perkotaan, dimana ketergantungan yang begitu kuat pada laut yang dianggapnya mampu menyediakan segala kebutuhan mereka, ternyata berbanding terbalik dari apa yang mereka harapkan.

Dari perspektif antropologi menunjukkan bahwa masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat yang lain, seperti masyarakat petani, perkotaan atau masyarakat di dataran tinggi. Perbedaan ini dipengaruhi oleh hasil interaksi nelayan dengan lingkungan beserta

sumber daya yang ada didalamnya. Kondisi ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sulaiman Mamar, (2013), yang menyatakan bahwa pola-pola perilaku kultural masyarakat zona perbukitan berbeda dengan perilaku masyarakat zona pesisir khususnya dalam mengembangkan mata pencaharian. Pola perilaku budaya itu pada intinya dapat mewarnai keseluruhan proses interaksi sosial bagi para nelayan dalam mengembangkan sistem mata pencaharian hidup sesuai dengan potensi sumber daya alam dan daya dukungan lingkungan yang tersedia di kawasan pesisir. Kompleksnya tantangan di laut dengan resiko melaut yang tinggi dan iklim yang tidak menentu serta kondisi kawasan pesisir yang serba terbatas dari segi ketersediaan infrastruktur ekonomi, turut berkontribusi terhadap pembentukan pola perilaku budaya masyarakat nelayan dalam menyikapi setiap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pola perilaku budaya itu antara lain tampak dari sikap masyarakat nelayan yang menjalani hidup apa adanya, apriori, malas berusaha serta hidup tergantung kondisi, artinya kalau kondisi iklim lagi bersahabat, maka nelayan beraktifitas melaut, dan sebaliknya jika iklim beresiko, mereka harus menunggu di rumah tanpa ada alternative pekerjaan lain, yang pada akhirnya dalam menutupi kebutuhan hidup sehari-hari, nelayan terpaksa terperangkap dalam hutang-piutang.

Selanjutnya perspektif kehidupan lain yang mendiskripsikan kehidupan nelayan miskin, adalah seperti terlihat dalam ruang dan kondisi demografi kawasan pesisir laut. Beberapa persoalan yang terakit dengan

kondisi demografi ini, terbentuk sebagai akibat ledakan jumlah penduduk yang kurang terkendali menimbulkan persoalan tersendiri yang mengakibatkan masyarakat nelayan harus berhadapan dengan suasana hidup yang serba tertekan oleh faktor ekonomi. Pertambahan jumlah anggota keluarga akibat angka kelahiran yang cukup tinggi, menuntut peningkatan pendapatan keluarga. Bilamana pertambahan jumlah anggota keluarga ini tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan kepala keluarga nelayan, akan sangat beresiko bagi ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hodijah, (2018), yang menyatakan bahwa jumlah anggota rumah tangga dapat mempengaruhi besarnya tanggungan keluarga. Dalam hal ini jumlah tanggungan keluarga ialah banyaknya anggota keluarga dalam suatu- rumah yang menjadi tanggungan kepala keluarga nelayan.

Fenomena demografi di kawasan pesisir pantai juga dapat dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang sering berakibat pada rendahnya pengetahuan dan keterampilan. Kondisi ini selain berimplikasi pada menurunnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakmampuan mengelola dan mengembangkan usaha, juga berpengaruh pada tingkat produktifitas nelayan (Arifin, 2014). Dengan kondisi ini dapat di pahami bahwa masyarakat dipastikan akan kehilangan kesempatan dalam mengakses dan mengembangkan potensi ekonominya, apalagi bila di kawasan pantai yang ditempati tidak menyediakan infrastruktur ekonomi yang cukup untuk memperbaiki derajat

hidup mereka, yang pada akhirnya akan lebih memperburuk suasana kehidupan nelayan. Dengan demikian dalam situasi seperti ini, potensi kemiskinan terbuka lebar lebar dan mengancam sendi-sendi kehidupan nelayan secara keseluruhan.

Menurut Dahuri (2010), beberapa persoalan teknis dan mikro yang menghambat kesejahteraan kaum nelayan dan menjadi penyebab mereka berkubang dalam kemiskinan antara lain; Pertama, Sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik social budaya yang memang belum kondusif untuk suatu kemajuan. Sekitar 60% dari 3,7 juta nelayan Indonesia tergolong miskin dan lebih dari 85% nelayan hanya berpendidikan SD, tidak tamat SD dan buta huruf; Kedua, struktur armada penangkapan yang masih didominasi oleh usaha kecil/tradisional dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah. Dari jumlah itu hanya 4.487 unit kapal (kurang dari 1%) yang tergolong modern, yaitu digunakannya kapal motor berukuran di atas 30% GT (*GrosTonnage*); Ketiga, dengan total sumber daya ikan laut sebesar 6,4 juta ton per tahun, maka untuk menjaga kelestarian dari stok ikan dan usaha perikanan tangkap seyogyanya bisa memanen stok ikan laut sekitar 80-90% dari total sumber daya itu (FAO, 1995). Artinya, *Total Allowable Catch* (TAC), jatah tangkapan yang diperbolehkan dari stok ikan laut sekitar 5,76 juta ton dibagi dengan jumlah seluruh nelayan.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan sebagaimana yang telah digambarkan melalui perspektif

kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan demografi, maka Kusnadi, (2008), dalam identifikasinya menemukan lima masalah pokok yang melingkupi kehidupan nelayan, antara lain; *Pertama*, kondisi alam, Kompleksnya permasalahan pada masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. *Kedua*, tingkat pendidikan nelayan. Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumberdaya manusia rendah dan tingkat produktivitas tangkapannya juga sangat rendah. *Ketiga*, pola kehidupan nelayan. Pola hidup konsumtif menjadi masalah laten pada masyarakat nelayan, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. *Keempat*, pemasaran hasil tangkapan, tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar. *Kelima*, program pemerintah yang belum memihak pada masyarakat nelayan. Deskripsi di atas merupakan pusan masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia (Suharto, 2014).

Memahami permasalahan kemiskinan yang melingkupi kehidupan nelayan secara umum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka semua negara-negara terutama di wilayah Afrika dan Asia Tenggara yang

mengalami kondisi yang sama terus melakukan upaya-upaya untuk menekan maupun menanggulangi masalah kemiskinan.

Khususnya di negara Indonesia, telah begitu banyak paket program bantuan yang ditujukan untuk menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat nelayan yang tinggal di hampir semua kawasan pesisir pantai. Konsep-konsep mengenai bagaimana bentuk penanggulangan kemiskinan dengan sejumlah strategi pendekatannya secara terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara atau wilayah tertentu dengan memperhatikan potensi pendukung dan perkembangan lingkungan strategisnya. Program padat karya yang menghadirkan beberapa bentuk intervensi kegiatan yang dipandang dapat mengubah status kehidupan para nelayan terus digulirkan dengan satu harapan agar nelayan dapat memperbaiki derajat kehidupan mereka. Beberapa bentuk intervensi program yang digulirkan kepada masyarakat miskin terutama masyarakat nelayan diantaranya adalah PDMDKE, P2KP, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Program Keluarga Harapan (PKH) serta jenis-jenis bantuan lain yang pernah ada dan dikucurkan selama dua dasawarsa ini untuk memperkecil kesenjangan di tengah-tengah masyarakat miskin.

Namun diakui sampai saat ini belum ditemukan suatu formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling tepat digunakan dimana

dengan formula itu, masyarakat miskin suatu negara atau wilayah tertentu dapat terbebas dari perangkap kemiskinan. Betapapun kesungguhan Pemerintah dalam menggulirkan program bantuan kemiskinan utamanya bagi masyarakat nelayan miskin, dalam beberapa kasus yang sering terdengar di beberapa daerah dan kawasan tertentu, semua bentuk intervensi program itu belum mampu membawa perubahan yang signifikan dalam merobah tatanan kehidupan masyarakat miskin keluar dari perangkap kemiskinan. Bentuk-bentuk program pengentasan kemiskinan yang dijumpai ditengah masyarakat, masih lebih banyak terkonsentrasi pada upaya penanggulangan keadaan sementara dan bahkan bersifat insidental, dimana masyarakat miskin hanya dalam waktu tertentu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pemberian paket bantuan. Strategi dan bentuk pengentasan kemiskinan cenderung tidak permanen dan bahkan tidak sampai menyentuh akar persoalan yang paling mendasar dirasakan oleh masyarakat miskin, sehingga tidak heran bila masyarakat miskin itu tetap bertahan dan tidak dapat keluar dari perangkap kemiskinan yang menyelimuti kehidupannya.

Suatu keadaan yang cukup memprihatinkan adalah banyak diantara keluarga nelayan miskin yang hidupnya terus menerus berharap mendapatkan paket bantuan dari pemerintah. Sementara dalam kehidupan keseharian mereka terkesan tidak berupaya memperbaiki keadaan ekonomi keluarga sehingga mereka bisa terbebas dari jeratan kemiskinan dengan tidak semata-mata berpangku tangan sambil

menunggu datangnya sentuhan bantuan dari pemerintah setempat. Kecenderungan sikap hidup yang terus bergantung pada adanya sentuhan bantuan melahirkan kesan bahwa nelayan miskin seperti telah terbuai dengan eksistensi kehidupan mereka yang seolah-olah sudah merasa nyaman berada di zona kemiskinan itu. Berbagai jenis bantuan sebagai bentuk intervensi untuk merubah kebiasaan hidup nelayan seolah tidak memberi pengaruh yang kuat untuk menggiring masyarakat keluar dari zona kemiskinan. Kondisi yang demikian menampakkan sebuah realitas bahwa kemiskinan terus terjadi dan berlangsung pada komunitas nelayan miskin, dan bahkan sering terdengar dan dijumpai dimana-mana bahwa sistem dan dinamika kehidupan seperti ini berlangsung terus menerus berlaku dari generasi ke generasi. Siklus kehidupan nelayan seperti yang demikian seolah sudah terbangun secara kultur dan terstruktur, sehingga terlihat secara nyata setiap pergantian generasi tetap saja berada dan terkurung dalam lingkaran hidup kemiskinan.

Sesungguhnya kenyataan hidup yang demikian ini amatlah memprihatinkan, sehingga itu tidak heran banyak pihak yang menaruh perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan miskin. Wujud perhatian itu tidak saja dalam hal pemberian paket-paket bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga dalam beberapa sudut pandang, banyak pihak terus melakukan pengkajian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, dan sampai mengapa sebuah kemiskinan itu terus terjadi dan berlangsung di

beberapa negara dan wilayah tertentu seperti halnya di negara Indonesia ini. Telah banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan budaya yang menaruh perhatian dan melakukan pengkajian tentang masyarakat nelayan, yang kemudian telah menghasilkan karya-karya ilmiah di bidang maritim. Terkhusus studi antropologi menemukan kemiskinan budaya yang disebabkan oleh faktor-faktor pendidikan dan keterampilan formal rendah, tidak punya kemampuan memanfaatkan pendapatan, bergaya hidup boros, tidak punya cita-cita dan masa depan, terlalu mempertahankan tradisi berupa pengetahuan yang diwariskan oleh nenek moyang, alat tangkap (Lihat Lampe, 1982; Kusnadi, 2000; Kusnadi, 2013).

Beberapa ahli yang telah melakukan studi tentang nelayan, seperti; Sallatang (1982), yang menelaah kelompok *Pinggawa-Sawi* dari sudut pandang dan pendekatan sosiologi dengan memfokuskan pada kelompok kecil, yang menemukan bahwa hubungan antara pinggawa dan sawi merupakan hubungan kepentingan yang diperkuat oleh hubungan kerabat dan hubungan kerabat yang lain banyak tampil, khususnya antara pinggawa besar dengan pinggawa kecil dan antara pinggawa besar dengan sawi. Kemudian, Imron (2002), yang mengkaji tentang *Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan*, Hasil penelitiannya menyebutkan beberapa faktor dan situasi membuat terpuruknya masyarakat nelayan dalam jeratan kemiskinan, antara lain: keterbatasan teknologi sebagai pemicu awal kemiskinan, terjeratnya mereka dalam

hutang, dan adanya keterbatasan dalam pemasaran hasil tangkap. Selanjutnya, Salman (2006), yang menelaah tentang Pergeseran Hubungan Industrial pada Komunitas Industri Pembuatan Perahu, Wisata Pantai dan Penangkapan Ikan melalui pendekatan sosiologis.. Penelitiannya menemukan bahwa kondisi masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan menunjukkan hubungan *patron- klien* yang masih sangat signifikan jika dibandingkan dengan masyarakat pertanian atau masyarakat perkotaan, sehingga kemajuan disisi produksi akibat modernisasi yang berlangsung belum diikuti sepenuhnya oleh pergeseran hubungan *patron-klien* ke hubungan industrial yang sifatnya kontraktual.

Dalam peneltian lain, para ahli juga menunjukkan ketertarikannya pada beberapa aspek kehidupan nelayan, seperti penelitian yang dilakukan oleh, Karim (1985), menelaah tentang aspirasi neleyan terhadap pendidikan anak di Cambayya Ujung Pandang. Selanjutnya, Rizal (1985) yang melihat dari sudut dan pendekatan sosiologis tentang pola perlakuan wanita masyarakat pelayar. Kemudian, Ahimsa Putra (1988) yang mengkaji *pinggawa-sawi* melalui pendekatan sejarah dan politik. Selain itu ahli kelautan dan perikanan Nur Indar (2004) tentang Teknologi dan Perubahan Sosial Budaya Nelayan Bagang Rambo yang fokus pada teknologi alat tangkap ikan dan dimensi sosial budaya sebagai konsekuensi dari dinamika sosial budaya suatu masyarakat.

Demikian besarnya perhatian para ahli ilmu sosial dan antropologi dalam menelaah kondisi kemiskinan dengan segala bentuk permasalahan

yang melatari kehidupan nelayan, pada gilirannya semua konsep yang dihasilkan melalui berbagai penelitian ilmiah tersebut adalah untuk mencari alternatif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Hasil-hasil penelitian tersebut menjadi sebuah pertimbangan bagi para pemangku kebijakan di tataran pemerintahan dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan nelayan terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan derajat hidup masyarakat nelayan.

Fenomena kemiskinan nelayan sebagaimana yang dikemukakan diatas yang telah banyak menarik perhatian para ahli itu, ketika dicermati dalam kehidupan masyarakat nelayan di Kota Gorontalo yang merupakan bagian wilayah Provinsi Gorontalo, maka secara umum berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan tersebut memiliki kesamaan karakteristik. Kondisi kemiskinan yang berlangsung pada komunitas nelayan Kota Gorontalo, fenomenanya dapat dilihat pula dalam dimensi kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan demografi dengan menunjukkan ciri yang hampir bersamaan dengan kemiskinan yang terjadi di beberapa daerah lain di Indonesia. Tercatat sejak tahun 2020, dari jumlah penduduk miskin Kota Gorontalo sebesar 11,9 ribu jiwa, kurang lebih sebanyak 1.224 jiwa atau 408 Kepala Keluarga (KK) yang termasuk nelayan miskin. Pemerintah Provinsi dan Kota Gorontalo telah banyak berupaya mengatasi dan menanggulangi masalah kemiskinan termasuk di dalamnya kemiskinan masyarakat nelayan, namun hingga saat ini kondisi

kemiskinan tersebut masih terus berlangsung di daerah ini. Demikian banyak intervensi program bantuan yang diberikan, namun masalah kemiskinan tetap saja menjadi persoalan yang terus terjadi dalam kehidupan masyarakat miskin terutama masyarakat nelayan di Kota Gorontalo.

Dari hasil penelitian ini terwakili namun belum ada suatu penelitian yang mencoba melihat hubungan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, budaya dan demografi. Belum ada suatu penelitian yang menghasilkan penelitian secara holistik dengan melihat hubungan antar faktor. Hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara holistic dengan menggunakan pendekatan antropologi mengenai fenomena kemiskinan pada masyarakat nelayan di Kota Gorontalo.

Dengan melihat hasil-hasil penelitian ilmiah yang menjadi salah satu rujukan dan pertimbangan dalam pengentasan kemiskinan seperti yang telah dikemukakan di atas, di sisi lain peneliti berpandangan bahwa hasil-hasil penelitian tersebut di atas belum sepenuhnya mengkonstruksikan sebuah konsep yang lebih terintegrasi dan holistik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian cenderung bersifat parsial dan tidak secara holistik menelaah kondisi-kondisi kemiskinan yang berlangsung di suatu daerah dengan melihat dimensi kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan demografi secara terintegratif. Dari keempat dimensi kehidupan masyarakat nelayan itu, antara satu

dengan yang lain saling terinterdependensi memberi pengaruh yang kuat menciptakan kondisi kemiskinan yang berkelanjutan disuatu tempat. Oleh karena itu saya memandang bahwa belum ada ahli yang mengkaji tentang kemiskinan dalam pendekatan sosio-kultural, sehingga dengan alasan tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan judul: Kemiskinan Seumur Hidup : Sebuah Penjelasan/Analisis Faktor Sosio-Kultural Internal dan Eksternal pada Masyarakat Nelayan di Kota Gorontalo.

B. Fokus dan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada kondisi kemiskinan nelayan dengan melihat secara holistik dan terintegratif tentang dimensi kemiskinan dan factor-faktor utama yang mempengaruhinya. Fokus penelitian tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Dimensi kemiskinan apa saja yang dialami secara berkelanjutan oleh nelayan dan bagaimana strategi bertahan hidup dalam kondisi miskin nelayan di Kelurahan Leato Selatan dan Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo.
2. Faktor-faktor sosial budaya Internal apa saja yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan berkelanjutan pada masyarakat nelayan di Kelurahan Leato Selatan dan Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

3. Faktor-faktor sosial budaya eksternal apa saja yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan pada masyarakat nelayan di Kelurahan Leato Selatan dan Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara realitas sosial mengenai budaya kemiskinan yang ada pada masyarakat nelayan. Sehingga dapat dianalisis bertujuan untuk:

1. Mengklasifikasi dan menguraikan dimensi kemiskinan yang dialami secara berkelanjutan oleh Masyarakat Nelayan di Kelurahan Leato Selatan dan Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
2. Menggambarkan strategi yang dikembangkan oleh nelayan sebagai respon budaya dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang dialami;
3. Menjelaskan/menganalisis faktor-faktor Sosial Budaya Internal dan Eksternal yang mempengaruhi terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua jenis manfaat, manfaat secara teoritis dan praktis.

Secara teoritis, Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menemukan tiga hal penting dalam kajian ilmu sosial dan antropologi yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan dan bagaimana gambaran kemiskini, faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan demografi apa saja secara holistik menyebabkan terjadinya kemiskinan yang berkelanjutan, dan bagaimana nelayan memaknai mengenai kemiskinan yang berkelanjutan itu dialami. Berkaitan dengan hal tersebut hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi konkrit untuk mengatasi masalah kemiskinan dalam pendekatan sosio-kultural.

Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat praktis bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan sosial ekonomi dan budaya masyarakat nelayan. Temuan dalam penelitian ini berupaya mengenali unsur-unsur dan menggambarkan fenomena kemiskinan nelayan yang berkelanjutan, menjelaskan faktor ekonomi, sosial, budaya, demografi secara holistik dan terintegratif, serta mengungkap pemaknaan-pemaknaan masyarakat nelayan tentang kemiskinan berkelanjutan yang dialami, sehingga berkontribusi pada perumusan kebijakan dan intervensi penanganan dan penanggulangan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya masyarakat nelayan di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masalah Umum yang Dihadapi Nelayan

Nelayan adalah orang-orang atau komunitas orang yang hidup di sepanjang pesisir pantai yang hidupnya bergantung pada laut. Mereka sangat gigih dan begitu akrab dengan kehidupan di laut yang sifatnya keras. Pada umumnya pengetahuan mereka relatif rendah dan masih bersifat tradisional, terutama pemahaman mereka tentang ekologi kelautan. Nelayan menjalani kehidupan di laut sudah secara turun temurun, dan telah terbiasa berhadapan dengan kerasnya kehidupan di laut. Kondisi yang menyertai kehidupan nelayan yaitu ditandai oleh beberapa ciri khas, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan segala infrastruktur wilayahnya relatif sangat terbatas yang tercerminkan pada tidak tersedianya sarana prasarana pemasaran yang mengakibatkan nelayan mengalami kesulitan dalam menjual produksinya berupa ikan sebagai hasil tangkapan.

Dalam menghadapi tantangan dan masalah-masalah di laut, masyarakat nelayan pada umumnya telah terbiasa dengan lingkungan laut yang penuh resiko dan serba tidak menentu. Meskipun mereka sadar terhadap tingginya resiko tersebut, maka tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan, selain mereka menghadapi tantangan itu dengan penuh tekad

dan harapan untuk memperoleh hasil tangkapan guna memenuhi kebutuhan hidup. Para nelayan sangat percaya betapa pun kuatnya tantangan itu, laut tetap menawarkan berbagai kemungkinan peluang untuk memperoleh nafkah. Semua aktifitas dilakoni oleh nelayan dengan penuh perjuangan dan keyakinan, keuletan dan ketabahan dengan menggunakan teknologi yang sederhana.

Secara umum, pada masyarakat nelayan ada sebuah kesadaran mereka untuk meningkatkan ekonominya yang tercermin melalui upaya peningkatkan pendapatan. Salah satu usaha yang mereka lakukan adalah dengan meningkatkan teknologi kenelayanan, baik dalam bentuk alat tangkap maupun alat bantu penangkapan (*perahu*). Ketergantungan nelayan terhadap teknologi penangkapan itu sangat tinggi, karena selain kondisi sumberdaya perikanan yang bersifat *mobile*, yaitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, juga untuk menangkap ikan nelayan perlu sarana bantu untuk dapat bertahan lama hidup di atas air (Acheson, 1981).

Sementara itu Chamber (1983), menjelaskan bahwa salah satu indikasi kemiskinan dapat dilihat dari kelemahan fisik melalui kekurangan makanan, tubuh kecil, malnutrisi yang menyebabkan respon imun yang rendah terhadap infeksi, dan ketidakmampuan untuk menjangkau atau membayar layanan Kesehatan. Kontribusi atas kelemahan fisik terlihat pada beberapa hal seperti; produktivitas rendah dari tenaga kerja yang lemah; ketidakmampuan untuk mengolah area yang lebih luas, atau untuk

bekerja lebih lama; upah yang lebih rendah yang dibayarkan kepada perempuan dan mereka yang lemah; penarikan atau pelemahan tenaga kerja karena sakit. Ia mengisolasi diri karena kurangnya waktu atau energi untuk menghadiri pertemuan atau mencari informasi, terutama bagi perempuan karena anak-anak mempersulit perjalanan. Ini menonjolkan kerentanan dengan membatasi kemampuan untuk mengatasi krisis melalui kerja keras, aktivitas baru, atau negosiasi untuk meminta bantuan. Ini berkontribusi pada ketidakberdayaan melalui kurangnya waktu atau energi untuk protes, organisasi, atau kegiatan politik; orang yang sakit dan lapar tidak berani menawar dengan keras. Kelima kluster dan keterkaitannya telah dieksplorasi dengan lebih lengkap, bahkan telah diuji dan dimodifikasi terhadap kasus-kasus tertentu. Hasilnya menunjukkan bahwa dua di antara karakteristik tersebut diatas, relatif diterima dan dipahami dengan baik; kemiskinan; dan isolasi, baik spasial maupun informasi.

Pandangan lain seperti yang dikemukakan oleh Lampe (1992), yang menjelaskan bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki meskipun masih bersifat tradisional, nelayan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan laut untuk menggali sumber ekonomi dan memecahkan masalah-masalah yang dijumpai di laut. Bahaya dan ketidak-menentuan ini bukan hanya disebabkan oleh kondisi alam dan biotik laut serta terjadinya perubahan-perubahan lingkungan fisik tersebut, tetapi juga oleh kondisi-kondisi sosial budaya. Kedua faktor

perubahan kondisi lingkungan dan sumberdaya laut dan sosial-budaya tersebut, berupa; *Pertama*, laut penuh resiko bahaya dan ketidakmenentuan; *Kedua*, adanya berbagai macam jenis dan pola kebiasaan ikan dan biotik lainnya; *Ketiga*, lingkungan laut yang tampaknya homogen tetapi sebenarnya bersifat mendua; *Keempat*, sumber ikan dan biotik laut lainnya merupakan milik kekayaan bersama masyarakat nelayan disekitarnya. *Kelima*, hasil produksi ikan yang cepat membusuk; *Keenam*, harga ikan di pasaran yang biasanya turun-naik; *Ketujuh*, ketidakmampuan nelayan menghadapi eksploitasi dari para pedagang atau tengkulak dan pemilik kapal atau perahu; *Kedelapan*, masalah-masalah psikologis dan peyimpangan budaya.

Guna meningkatkan pendapatan dan derajat ekonominya, nelayan terus berupaya memperbaiki kualitas teknologi yang dimiliki seperti perahu dan peralatan tangkap lainnya. Menurut Imron (2003), peningkatan teknologi itu dilakukan melalui dua cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi alat tangkap berarti nelayan perlu memiliki alat tangkap yang tingkat eksploitasinya lebih tinggi daripada alat tangkap yang telah dimiliki. Sedangkan ekstensifikasi berarti nelayan perlu memperbanyak jenis alat tangkap yang dimiliki, sehingga bisa menangkap berbagai jenis sumberdaya ikan. Namun disisi lain, upaya untuk meningkatkan peralatan itu terkendala oleh faktor ekonomi, sehingga terpaksa peralatan yang mampu dibeli hanyalah peralatan yang

sederhana, atau bahkan mungkin tidak mampu membeli peralatan tangkap sama sekali.

Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara menurut Mulyadi (2005), masyarakat nelayan dibagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan posisinya; *Pertama*, Nelayan juragan, yaitu nelayan pemilik alat lengkap, perahu yang dioperasikan oleh orang lain; *Kedua*, Nelayan buruh, yaitu nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain; *Ketiga*, Nelayan perorangan, yaitu nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain. Dari ketiga kategori nelayan ini, masing-masing ciri dan karakteristik tersendiri dan berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik itu ditentukan oleh peran dan status sosial yang mempengaruhi pola hubungan sosial diantara mereka. Namun secara umum karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarapnya, dalam hal ini kawasan laut dan lingkungan pesisir yang memiliki ciri khas sosial dan budaya tersendiri. Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh

besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, 2007). Baik nelayan petambak maupun pembudidaya perikanan merupakan kelompok-kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah sebagai upaya untuk memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya, (Sebenan, 2007). Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir, sebagian besar masih rendah, serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Kondisi masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain.

Menurut Kusnadi, (2008), secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki sistem nilai dan symbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka sehari-hari. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai dan atau menetap di daerah pesisir pantai dengan membentuk suatu komunitas yang disebut dengan komunitas nelayan. Disisi lain, secara sosiologis, karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani seiring dengan perbedaan karakteristik sumberdaya yang dihadapi. Masyarakat petani menghadapi sumberdaya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan output yang relatif bisa diprediksi. Karakteristik tersebut berbeda sama sekali dengan nelayan.

Dalam sudut pandang lain, Satria (2009), nelayan menghadapi sumberdaya yang hingga saat ini masih bersifat open access. Karakteristik sumberdaya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang beresiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka. Dalam hal ini karakter keras lahir karena nelayan dibentuk dan dibangun oleh lingkungan alam yang keras dan penuh tantangan. Sedangkan karakter tegas, terbentuk karena nelayan tidak ingin berpanjang lebar atau berbasa-basi dalam menyikapi sesuatu, sementara karakter terbuka lahir karena nelayan memiliki sifat apa adanya terhadap apa yang mereka

hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Dilihat dari perspektif antropologi, masyarakat nelayan berbeda dari masyarakat lain, seperti masyarakat petani, perkotaan, atau masyarakat di dataran tinggi. Sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan yang bermukim di sepanjang pantai memiliki ciri khas kehidupan yang berlainan sesuai dengan habitat mereka di laut. Masyarakat nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumber daya yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berfikir atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perwujudan kebudayaan tersebut dapat dilihat dari pranata-pranata sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai komunitas yang tinggal di kawasan pesisir, nelayan melakukan aktivitas mengeksploitasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya pesisir dan perairan yang bersifat milik semua orang (*common goods*) sebagai poros tumpu kehidupan sangat ditentukan oleh musim, rentan terhadap degradasi ekosistem, dan gejolak sosial ekonomi, (Irianto, 2008). Kondisi demikian telah menjadi bagian rutinitas kehidupan masyarakat nelayan, namun itulah pilihan hidup mereka yang telah berlangsung lama. Pekerjaan sebagai nelayan telah diwarisi secara turun temurun, baik dari peralatan yang digunakan, cara penangkapan ikan,

waktu turun untuk mencari ikan serta tempat di mana ikan berada dan kapan waktu yang tepat untuk turun mencari ikan (Azhar, 2011).

B. Dimensi Kemiskinan Masyarakat Nelayan

Kemiskinan yang melanda suatu komunitas masyarakat adalah hasil dari sebuah proses aktivitas yang panjang dan berlangsung secara turun temurun dari generasi ke generasi yang ditandai oleh banyak fenomena keprihatinan dalam semua aspek kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Untuk memastikan seseorang atau kelompok orang (*civil society*) dikatakan tergolong miskin dapat dilihat dalam berbagai dimensi kondisi kemiskinan nelayan.

Dimensi kemiskinan nelayan yang berkaitan dengan faktor ekonomi atau hal-hal yang berkaitan dengan mata pencaharian dalam kaitannya dengan interaksi dengan faktor eksternal dan internal, antara lain dapat dicermati melalui tingkat pendapatan yang relatif rendah, ketidakmampuan dalam mengakses pasar, terbatasnya sarana pemasaran dan kurangnya modal usaha,. Rendahnya pendapatan nelayan antara lain tercermin melalui ketidakmampuan nelayan dalam memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang dan papan), keterbatasan teknologi yang dimiliki serta fluktuasi iklim dan cuaca di laut yang tidak menunjang dimana nelayan tidak dapat melakukan aktifitas menangkap ikan secara maksimal. Disisi lain ketidakmampuan dalam mengakses pasar ditunjukkan oleh kurangnya pengetahuan nelayan dalam memanfaatkan peluang pasar, sehingga upaya memasarkan produksi laut berupa ikan hasil tangkapan tidak dapat

menjangkau akses pasar yang lebih luas. Kurangnya sarana prasarana pemasaran seringkali mempengaruhi kondisi ekonomi nelayan dimana posisi nelayan tidak dapat memasarkan ikan sebagai hasil tangkapan secara lebih luas. Kondisi ini diperparah lagi oleh tidak adanya modal usaha yang mengakibatkan usaha-usaha nelayan berjalan statis dan cenderung tidak berkembang kedalam skala usaha yang lebih besar. Probelematika kemiskinan sebagaimana yang digambarkan diatas, berimplikasi pada lahirnya upaya untuk bertahan dalam situasi yang sulit meskipun dililit oleh berbagai keterbatasan ekonomi. Fenomena kemiskinan seperti ini disinyalir oleh James Scott (1981) melalui teori "*mekanisme survival*" yang memandang bahwa dua tiga cara yang dilakukan masyarakat miskin untuk bertahan hidup, yaitu dengan mengurangi pengeluaran untuk pangan dengan jalan makan hanya sekali sehari dan beralih ke makanan yang mutunya lebih rendah.

Dari sudut pandang dimensi sosial, maka implikasi kemiskinan tersebut memanfaatkan mekanisme fungsi sosial yang menurut Scot (1981) bahwa masyarakat miskin berupaya meminta bantuan dari jaringan sosial seperti sanak saudara, kawan-kawan atau memanfaatkan hubungan dengan pelindungnya (*patron*), dimana ikatan patron dan kliennya merupakan bentuk sebuah asuransi. Patron menurut definisinya, adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya. Patron dalam kehidupan petani adalah pemilik modal yang dapat membantu kesulitan keuangan yang dihadapi. Selain itu masyarakat

miskin dapat menggunakan alternatif subsistem yaitu swadaya yang mencakup kegiatan seperti berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, sebagai buruh lepas, atau melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan. Cara ini dapat melibatkan seluruh sumber daya yang ada di dalam rumah tangga miskin, terutama istri sebagai pencari nafkah tambahan bagi suami. Realitas kehidupan yang dideskripsikan oleh Scot dalam teori “mekanisme survival” ini berlaku pula bagi sebagian besar masyarakat nelayan dimana kurangnya pendapatan nelayan melahirkan tindakan antisipatif yang tercermin melalui upaya membatasi konsumsi rumah tangga. Selain itu melalui mekanisme hubungan social dapat dimanfaatkan untuk memperoleh bantuan dari pihak lain guna mengatasi desakan kebutuhan hidup sehari-hari. Ketergantungan nelayan (*klien*) terhadap para pemilik usaha (*patron*) sangatlah tinggi sebagai upaya mengatasi tekanan ekonomi pada setiap rumah tangga nelayan.

Di bagian lain, Friedman (1992) dalam penelitiannya merumuskan kriteria pemenuhan kebutuhan dasar sebagai berikut; *Pertama*, kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya); *Kedua*, pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan); *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka; *Keempat*, terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang

lebih luas dari hak-hak dasar manusia. Pandangan Friedmann ini memberi gambaran bahwa dimensi kemiskinan nelayan senantiasa diwarnai oleh ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan perumahan. Kondisi ini merupakan akibat dari rendahnya pendapatan, dimana produksi nelayan yang ditunjukkan melalui perolehan hasil melaut tidak mampu menunjang keinginan ataupun hasrat untuk memenuhi ketiga kebutuhan diatas. Sebagai konsekuensi dari rendahnya pendapatan nelayan, dan terutama juga kurangnya perhatian pemerintah, maka dimensi kemiskinan yang sering terlihat di banyak kawasan pesisir yang dihuni oleh masyarakat nelayan adalah terbatasnya sarana air bersih, kondisi sanitasi yang kurang baik, tidak terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik, bahkan kurangnya sarana prasarana kesehatan dan pendidikan.

Dimensi kemiskinan menunjukkan ciri khas tertentu dimana fenomenanya sangat ditentukan oleh satu situasi pada saat mana kemiskinan itu berproses dan terbangun. Kondisi-kondisi yang berlangsung dalam sebuah komunitas masyarakat akan sangat berkontribusi terhadap pembentukan kemiskinan, apakah itu berkaitan dengan kondisi sosio-kultural maupun pendekatan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam kurun waktu tertentu yang cenderung kurang berpihak pada masyarakat. Soetrisno (1995), menguraikan bahwa munculnya kemiskinan berkaitan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat, ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi dan

penggunaan model pendekatan pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Oleh karena itu dimensi kemiskinan dalam konteks budaya ini diantaranya tercermin melalui pola perilaku masyarakat nelayan yang tidak memiliki motivasi untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Kondisi ini dapat dilihat dari rendahnya pendidikan dan keterampilan, pemilikan teknologi penangkapan ikan yang masih bersifat tradisional dan rendahnya motivasi dalam mengembangkan usaha kenelayanan. Sementara itu dimensi kemiskinan yang berkaitan dengan model pendekatan dan kebijakan yang berlaku cenderung banyak melahirkan kondisi diskriminatif dan ketidakadilan dalam pemilikan factor produksi bahkan posisi nelayan sama sekali tidak memiliki akses secara struktur dalam mengembangkan usahanya sebagai nelayan.

Dimensi kemiskinan nelayan lainnya dapat dicermati melalui pandangan Imron (2003) yang mengemukakan bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan dapat dilihat dalam dua kategori, yaitu; *Pertama*, kemiskinan pada prasarana fisik yang tersedia di desa-desa nelayan, yang pada umumnya masih sangat minim, seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar; *Kedua*, tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standard. Kemiskinan prasarana itu secara tidak langsung juga memiliki andil bagi munculnya kemiskinan keluarga. Tidak tersedianya air bersih misalnya, memaksa keluarga untuk mengeluarkan uang untuk membeli air bersih, yang berarti mengurangi pendapatan mereka. Atau jika tidak membeli,

mereka terpaksa harus membuang waktu untuk mendapatkan air bersih, yang berarti mengurangi waktu yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Begitu pula lokasi yang jauh dari pasar, membuat mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menjual hasil tangkapan, atau harus merelakan hasil tangkapannya dibeli oleh tengkulak dengan harga murah bahkan di bawah harga pasar. Pos pengeluaran untuk bahan bakar pengoperasian perahu juga membesar karena tidak memiliki akses pembelian bahan bakar secara langsung ke tempat-tempat penjualan resmi. Karena itu kemiskinan prasarana bisa mengakibatkan keluarga yang berada di garis kemiskinan (*near poor*) bisa merosot ke dalam kelompok keluarga miskin.

Konsep kemiskinan sebagaimana yang dikemukakan diatas jika disecrmati dalam kehidupan nelayan, maka eksistensi nelayan selalu diidentikkan dengan keterbatasan asset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dan akses pasar yang kurang. Usaha perikanan tangkap hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan sering kali merasa kurang. Oleh karena itu kondisi ini menurut sebuah lembaga penelitian SMERU dalam Suharto (2005), mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki berbagai dimensi, yaitu; *Pertama*, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, dan papan); *Kedua*, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi); *Ketiga*, tidak adanya jaminan masa depan; *Keempat*, kerentanan terhadap goncangan yang

berifat individual maupun massal; *Kelima*, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam; *Keenam*, tidak dilibatkannya dalam kegiatan social masyarakat; *Ketujuh*, tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan matapencaharian yang berkesinambungan.

Dimensi kemiskinan jika ditelaah melalui aspek lingkungan, maka Rusastra dan Napitupulu (2007), menyatakan bahwa penduduk miskin adalah agen dan korban kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan guna menjamin pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Kondisi tersebut sangat konkrue dengan apa yang dikemukakan oleh Bene di tahun 2003, dalam (Dahuri, 2010), menyebutkan fenomena nelayan dengan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan ketiadaan model sederhana yang menggambarkan hubungan di antara nelayan dan kemiskinan yang didasarkan dari faktor internal maupun eksternalnya. Kemiskinan pada masyarakat nelayan menjadi dua sisi yang sama, apakah mereka menjadi nelayan karena miskin atautkah mereka miskin karena menjadi nelayan. Pada rumah tangga nelayan miskin, untuk bisa mempertahankan hidup, mereka tetap mengeksploitasi sumberdaya perikanan yang telah mengalami *overfishing* bahkan dengan cara yang destruktif sekalipun, akibatnya lingkungan laut dalam jangka panjang menjadi tidak kondusif dan berpengaruh terhadap menurunnya produksi nelayan. Hal ini seperti

yang dikatakan Fauzi (2005), kemiskinan di wilayah pesisir memicu *destructive fishing* yang kemudian mengacaukan mata rantai makanan.

Dengan berbagai dimensi kemiskinan sebagaimana yang diuraikan diatas serta fenomena yang menyertainya, tidak heran jika ukuran kemiskinan seperti yang dirilis oleh Bank Dunia sejak tahun 2010 diperoleh gambaran bahwa; kondisi masyarakat “sangat miskin” adalah orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari US\$1 per hari, dan “miskin” dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan “sangat miskin” dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut “miskin” (Retnowati, 2011).

C. Faktor-Faktor Sosial Budaya Internal dan Eksternal yang Menyebabkan Kemiskinan Nelayan Berkelanjutan

Kemiskinan nelayan disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan kondisi internal sumberdaya manusia nelayan dan aktifitas kerja yang dilakukan, sedangkan faktor eksternal terkait dengan kondisi di luar diri nelayan (Kusnadi, 2004). Namun dalam pembahasan penelitian ini, faktor penyebab kemiskinan nelayan akan dikaji melalui empat factor utama, yaitu; faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya dan faktor demografi.

1. Faktor Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, kemiskinan sangat mudah dilihat dan menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, perumahan dan kesehatan. Dalam kaitannya dengan masyarakat nelayan, kemiskinan dalam dimensi ekonomi itu secara kualitatif dapat dilihat pada kondisi perumahan yang kumuh dengan perabotan yang seadanya, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan yang rendah, begitu pula kondisi pendidikan yang juga rendah, kurangnya modal usaha nelayan, terbatasnya akses ekonomi, harga-harga yang tidak menentu, relasi ekonomi yang tidak seimbang.

Ketika masalah kemiskinan ini ditinjau dari keberadaan hubungan patron klien, maka Scott (1981), menjelaskan bahwa hubungan patron-klien merupakan hubungan yang antara dua pihak yang menyangkut persahabatan, dimana seorang individu dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) menggunakan pengaruh dan sumber-sumber yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan atau keuntungan bagi seseorang yang statusnya lebih rendah (*klien*), dan sebaliknya si-klien membalas dengan memberikan dukungan dan bantuan secara umum termasuk pelayanan pribadi kepada patron. Dalam hubungan ini pertukaran tersebut merupakan jalinan yang rumit dan berkelanjutan, biasanya baru terhapus dalam jangka panjang. Imbalan yang diberikan klien bukan imbalan berupa materi melainkan dalam bentuk lainnya. Si-

patron tidak akan mengharapkan materi atau uang dari klien tapi mengharapkan imbalan lainnya yang dibutuhkan si-patron.

Dalam memahami hubungan patron-klien, ada satu hal penting yang mendasari hubungan ini. Hubungan patron-klien berawal dari adanya pemberian barang atau jasa dalam berbagai bentuk yang sangat berguna atau diperlukan oleh salah satu pihak, sementara bagi pihak yang menerima barang atau jasa tersebut berkewajiban untuk membalas barang tersebut. Dalam kaitan ini, Scott memberikan contoh terhadap hasil temuannya dengan melihat hubungan timbal balik yang terjadi antara petani penggarap dengan pemilik lahan. Supaya bisa menjadi patron, pemilik lahan memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk merekrut klien. Mereka memberikan pekerjaan berupa menggarap lahan yang dimiliki patron. Selain patron juga tidak segan-segan melindungi kliennya dengan memberikan jaminan ketika paceklik tiba maupun melindungi para penggarap lahan terhadap makelar. Dari perlindungan inilah patron mengharapkan hadiah dari kliennya, tergantung pada apa yang dibutuhkan oleh sang patron kelak.

Dalam patron-klien, hubungan dibangun tidak berdasarkan pemaksaan atau kekerasan. Hubungan ini identik terjadi dalam bentuk hubungan pertemanan atau hubungan yang sama-sama menguntungkan (simbiosis mutualisme). Seperti yang disampaikan oleh Scott (1981) yang mengatakan bahwa hubungan patronase mengandung unsur utama yaitu bahwa apa yang diberikan oleh satu pihak adalah sesuatu yang

berharga di mata pihak lain, entah pemberian itu berupa barang ataupun jasa, dan bisa berbagai ragam bentuknya.

Disisi lain, Chambers (1983), menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kemiskinan adalah; lilitan kemiskinan, hilangnya hak atau kekayaan yang sukar untuk kembali, mungkin disebabkan desakan kebutuhan yang melampaui ambang batas kekuatannya, misalnya pengeluaran yang sudah diperhitungkan sebelumnya, namun jumlahnya sangat besar, atau tiba-tiba dihadapkan pada krisis yang hebat. Lazimnya kebutuhan yang mendorong seseorang yang terlilit kemiskinan, berkaitan dengan lima hal; kewajiban adat; musibah; ketidakmampuan fisik, pengeluaran tidak produktif dan pemerasan. Pandangan Chambers ini dapat dimaknai bahwa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ada kewajiban-kewajiban yang berlaku secara universal untuk dipenuhi agar seseorang memperoleh pengakuan atas status sosialnya. Disinilah seorang anggota masyarakat berusaha untuk memenuhi kewajiban itu meskipun dengan cara berhutang. Sementara ketidakmampuan fisik akan berkontribusi pada timbulnya ketidakberdayaan yang pada akhirnya seseorang tidak dapat mengakses ruang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan. Belum lagi bila eksistensi seseorang dalam kehidupan ekonominya cenderung bersikap boros sehingga menimbulkan perilaku konsumtif dengan melakukan pengeluaran yang tidak produktif. Dalam posisi ini maka indikasi yang mengarah pada munculnya perilaku

pemerasan, terbuka dengan lebar hanya karena sebuah hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Menurut pengertian ini kemiskinan sekelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak, (Tadjuddin, 1995). Shrap, et.al dalam Kuncoro (1997), mengidentifikasi ada tiga penyebab kemiskinan di pandang dari sisi ekonomi, yaitu; *Pertama*, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang; *Kedua*, kemiskinan timbul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia; *Ketiga*, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketika penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of proverty*), maka hal yang terkait dengan keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berakibat pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi mengakibatkan pada keterbelakangan suatu masyarakat.

Selanjutnya didalam permasalahan kemiskinan nelayan, terdapat dua pranata strategis yang dianggap penting untuk memenuhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan yaitu pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Dalam berbagai kajian dan hasil-hasil penelitian yang dijumpai, kedua pranata sosial ekonomi tersebut dipandang oleh para pengkaji atau peneliti (dalam perspektif *etic*) bersifat eksploitatif sehingga menjadi sumber potensial timbulnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat nelayan. Dalam perspektif Geertz (1973) dalam Kusnadi (2003), keberadaan kedua pranata sosial ekonomi dimaksud telah menempatkan masyarakat nelayan terpintal ke dalam jaring-jaring kebudayaan yang menyebabkan mereka terisolir.

Karena kebutuhan kontekstual atau pilihan rasional masyarakat nelayan, dalam persepektif kebudayaan nelayan, mereka jarang mempersoalkan pranata tersebut secara negatif. Nelayan sendiri menyadari bahwa dalam sistem pembagian hasil atau pemasaran hasil tangkapan, yang menempatkan para pemilik perahu atau pedagang/perantara ikan memperoleh bagian atau keuntungan besar dari kegiatan tersebut, dipandang sebagai kewajaran. Pembagian tersebut dianggap sesuai kontribusi, biaya, dan resiko ekonomi yang harus ditanggung dalam proses produksi dan pemasaran hasil tangkapan. Proses demikian terbentuk karena faktor keterpaksaan atau karena tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan nelayan. Kalaupun di antara mereka ada yang mengeluh, mereka tidak cukup daya untuk mengubah pranata

tersebut agar lebih memihak kepentingan nelayan, khususnya nelayan buruh, (Kusnadi, 2003).

Beberapa diantara faktor penyebab kemiskinan disektor ekonomi ini juga dapat dilihat dari rendahnya investasi rumah tangga nelayan kecil dan buruh nelayan. Menurut Tain (2011), rendahnya investasi di kalangan nelayan kecil ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan sosial ekonomi rumah tangga nelayan yang bersangkutan. Pola penerimaan rumah tangga yang bersifat harian dengan jumlah yang tidak banyak cenderung menjadikan penghasilan di satu hari habis untuk segala keperluan di hari tersebut. Kondisi ini terkadang muncul dari sebuah pemahaman bahwa hari besok masih bisa dapat penghasilan lagi dari menangkap ikan karena laut merupakan sesuatu yang menurut nelayan dapat menjanjikan kehidupan di hari berikutnya. Alam telah memanjakan nelayan untuk tidak berhemat seperti halnya petani. Apalagi musim ikan yang sesuai dengan alat tangkap yang dimiliki nelayan tidak berlangsung sepanjang tahun. Kondisi seperti ini sering berimplikasi pada sikap nelayan terutama nelayan kecil (tradisional) mengandalkan utang di saat tidak ada hasil tangkapan. Utang tersebut akan dibayar saat hasil tangkapan ikan melimpah, dimana nelayan memiliki penghasilan yang cukup. Keadaan yang demikian menjadikan tingkat investasi untuk meningkatkan kualitas peralatan tangkap di kalangan nelayan kecil relative rendah. Pada umumnya nelayan kecil merupakan kelompok masyarakat termiskin dan menjadi nelayan dalam waktu yang relatif lama dengan tingkat

pendapatan yang tidak pasti, meskipun memiliki resiko yang sangat tinggi. Ini terjadi karena menjadi nelayan tidaklah semata sebagai matapencaharian (*livelihood*), tetapi sudah merupakan satu-satunya jalan hidup (*way of life*), yang menurut Goodwin (1990), menyatakan bahwa secara umum para nelayan tersebut akan mewariskan tradisi menangkap ikan kepada generasi berikutnya meskipun matapencaharian tersebut bersifat marjinal.

Dengan pemberian barang dan jasa pihak penerima merasa berkewajiban untuk membalasnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik. Kedua adanya unsur timbal balik yang membedakan dengan hubungan yang bersifat pemaksaan atau hubungan karena adanya wewenang formal, Putra (1988), dalam (Pabbabari 2010). Sekalipun hubungan patron-klien terbangun bukan atas dasar paksaan, namun hubungan ini tetaplah tidak seimbang. Ketidakseimbangan terjadi karena ada satu aktor (*patron*) yang mendominasi aktor yang lain (*klien*). Patron memiliki sesuatu modal yang bisa ditawarkan kepada klien, sementara klien hanya bisa memberikan hadiah sebagai bentuk timbal balik. Ilustrasi lain yang menggambarkan fenomena hubungan patron-klien ini, dikemukakan pula oleh Arifin (2014), yang berpandangan ada kecenderungan bahwa pendapatan seorang sawi pa'rengge (*klien*) yang diperoleh dari patron dalam bentuk bagi hasil, umumnya hanya untuk menutupi hutang piutangnya dengan pinggawa kecil dan pinggawa besar, termasuk utangnya pada warung atau toko yang biasa ditempati untuk meminjam

untuk kebutuhan sehari-hari yang dekat dari tempat tinggalnya. Pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan sebagai sawi, hingga sekarang belum mengalai peningkatan secara berarti. Sementara kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dalam keluarga semakin bervariasi dalam jumlah dan jenisnya.

Sementara itu, menurut Kusnadi, (2006), sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada nelayan adalah; *Pertama*, belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu di antara para pemangku kepentingan pembangunan; *Kedua*, adanya inkonsistensi kuantitas produksi (hasil tangkapan), sehingga keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Hal ini disebabkan oleh kondisi sumber daya perikanan telah mencapai kondisi “*over fishing*”, musim paceklik yang berkepanjangan, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (*BBM*); *Ketiga*, masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar-masuk arus barang, jasa, kapital, dan manusia, yang mengganggu mobilitas sosial ekonomi; *Keempat*, adanya keterbatasan modal usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya; *Kelima*, adanya relasi sosial ekonomi yang “*eksploitatif*” dengan pemilik perahu, pedagang perantara (*tengkulak*), atau pengusaha perikanan dalam kehidupan masyarakat nelayan; dan *Keenam*, adalah rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak negatif terhadap upaya

peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas mereka.

Apa yang telah diungkapkan oleh Kusnadi di atas memang demikianlah adanya, bahwa kemiskinan yang dialami oleh nelayan diantaranya disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki dan pendidikan nelayan yang rata-rata masih rendah yakni Sekolah Dasar dan bahkan ada yang tidak menamatkan Sekolah Dasar, sehingga kemampuan atau *skill* yang dimiliki pun terbatas, kehidupan nelayan yang penuh dengan tekanan dari pemilik modal.

2. Faktor Sosial

Tinjauan kemiskinan nelayan dari sudut pandang kehidupan sosial, antara lain dapat ditelaah melalui pendapat Kusnadi (2003), bahwa faktor yang menyebabkan mayoritas nelayan di Indonesia masih terlilit derita kemiskinan yaitu faktor teknis dan faktor struktural. Faktor teknis menyangkut tingkat pendapatan nelayan dibanding dengan tingkat pengeluaran atau konsumsi, ketersediaan stok ikan, pemanfaatan teknologi, faktor pendukung seperti ketersediaan bahan bakar, dan peralatan yang digunakan termasuk perahu, pukot dan pancing serta jala. Faktor struktural saat ini merupakan penyebab dominan dari kemiskinan nelayan, yakni kebijakan dan program pemerintah yang tidak kondusif yang mendukung upaya pengentasan masalah yang dihadapi nelayan dari jeratan kemiskinan. Nelayan tradisional tidak mempunyai modal untuk mengembangkan usahanya karena ketidakadaan modal, sedangkan pemerintah belum banyak membantu dalam hal penyediaan modal.

Ketersediaan bekal melaut BBM, beras dan alat tangkap lainnya masih sangat sulit diperoleh para nelayan. Kedua faktor ini yang menyebabkan nelayan masih identik dengan kemiskinan karena akar-akar kemiskinan masih melilit dan tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat nelayan di nusantara ini. Oleh karenanya, perlu dilakukan pengkajian tentang akar-akar kemiskinan yang masih tertanam kuat dalam kehidupan nelayan sehingga kehidupan mereka masih sangat sulit untuk mencapai tingkat kesejahteraan seperti masyarakat lain yang menekuni pekerjaan lain seperti petani, buruh dan lain-lain.

Hasil penelitian lain juga diungkapkan oleh Anam (2007), yang menelaah tentang artikulasi modernisasi dan dinamika formasi sosial pada nelayan kepulauan, dengan menemukan bahwa distribusi pendapatan pada kelompok nelayan yang menerima bantuan kredit lebih baik, ketimbang yang tidak menerima bantuan kredit. Kemudian, Arief, (2007) yang memusatkan kajiannya tentang artikulasi modernisasi dan dinamika formasi sosial pada nelayan kepulauan di Sulawesi Selatan, yang menjelaskan temuannya bahwa proses modernisasi perikanan melalui penetrasi kapital telah menyebabkan terjadinya pergeseran formasi sosial cara produksi subsistem ke cara produksi komersial dan berlanjut ke cara produksi kapitalis. Disisi lain, Arifin (2014) menelaah tentang nelayan dalam perangkap kemiskinan melalui Pendekatan Strukturasi Patron-Klien dan Perangkap Kemiskinan pada Komunitas Nelayan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa; *Pertama*, prasyarat fungsional AGIL

telah membuka ruang kapasitas bagi munculnya elemen-elemen baru yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem sosial kenelayan sebagai tempat berlangsungnya strukturasi patron-klien; *Kedua*, meskipun AGIL telah membuka ruang kapasitas dalam sistem sosial kenelayan, namun tidak dapat mengintegrasikan elemen-elemen baru ke dalam struktur relasi patron-klien, *ketiga*, dengan adanya kekuatan strukturasi yang telah mengarahkan, membentuk, dan membatasi tindakan aktor dalam relasi patron-klien, maka tidak memungkinkan bagi aktor sawi untuk memanfaatkan elemen-elemen baru pada ruang kapasitas yang disajikan oleh AGIL, sehingga “perangkap kemiskinan” dalam relasi patron-klien tetap berlangsung.

Selanjutnya dalam pandangan Tain, (2011), menjelaskan bahwa kemiskinan pada rumah tangga nelayan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk kemiskinan berdasarkan faktor pembentuknya. *Pertama*, kemiskinan struktural. Kemiskinan ini diderita oleh golongan nelayan karena kondisi struktur sosial yang ada menjadikan mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia, juga akibat tatanan kebijakan yang lebih menguntungkan golongan pemilik modal (nelayan besar). Kekuatan-kekuatan di luar rumah tangga nelayan kecil menjadikan mereka terpinggirkan dan hidup dalam belenggu kemiskinan. Jadi persoalannya adalah ketidakmerataan akses pada sumberdaya karena struktur sosial yang ada. *Kedua*, kemiskinan kultural yang melihat kemiskinan terjadi karena faktor budaya seperti

kemalasan yang bersumber pada nilai-nilai lokal yang memang tidak kondusif bagi suatu kemajuan. Kemiskinan ini tidak lepas dari tata nilai yang dianut rumah tangga nelayan yang bersangkutan dalam menjalani hidup. *Ketiga*, kemiskinan alamiah terjadi di mana kondisi alam yang tidak mendukung mereka melakukan kegiatan ekonomi produktif ataupun perilaku produksi yang tidak produktif akibat sifat sumberdaya yang bersangkutan. Dalam konteks masyarakat nelayan, dapat digambarkan akibat laut dipandang sebagai “*common property*” dan akses terbuka menjadikan perikanan laut dieksploitasi secara berlebih bahkan dengan alat dan bahan terlarang. Para nelayan berperilaku untuk saling mendahului dan berupaya memperoleh hasil tangkapan lebih banyak dibanding nelayan lain. Bahkan sebagian dari mereka menggunakan alat atau bahan terlarang tanpa berfikir masalah keberlanjutan sumberdaya ikan yang ada. Dengan demikian dapat di pahami bahwa kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering melilit kehidupan suatu masyarakat termasuk masyarakat nelayan. Kemiskinan pada umumnya ditandai dengan derita keterbelakangan, ketertinggalan, rendahnya produktivitas, selanjutnya meningkat menjadi rendahnya pendapatan yang diterima. Hampir di setiap negara, kemiskinan selalu terpusat di tempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di pedesaan atau daerah-daerah yang kekurangan sumber daya alam, (Hamdani: 2013).

3. Faktor Budaya

Menelaah kondisi kemiskinan dari sudut pandang kehidupan social budaya, dapat diikuti melalui pandangan Oscar Lewis yang memperkenalkan idenya tentang "subkultur kemiskinan" pada tahun 1958, yang dia istilahkan sebagai "budaya kemiskinan, yang kemudian deskripsi terbesar dari konsep ini dikembangkan dalam bukunya *La Vida* (1966). Dalam buku ini dijelaskan bahwa masalah dan kondisi apa yang mendukung pengembangan budaya kemiskinan, adalah bahwa mereka mengalir dari masyarakat kapitalis industri dengan ketidaksetaraan yang melekat, dengan ciri-ciri tersebut antara lain; *Pertama*, upah tenaga kerja dan produksi untuk keuntungan; *Kedua*, tingkat pengangguran yang tinggi; *Ketiga*, setengah pengangguran untuk tenaga kerja tidak terampil; *Keempat*, upah rendah dan kegagalan untuk menyediakan organisasi sosial, politik; *Kelima*, ekonomi bagi penduduk berpenghasilan rendah; *Keenam*, sistem kekerabatan bilateral; *Ketujuh*, nilai-nilai kelas dominan yang menekankan pada akumulasi kekayaan dan properti, kemungkinan mobilitas ke atas, dan penghematan; dan menyalahkan orang miskin atas ketidakcakapan pribadi.

Beberapa karakteristik yang disebutkan menyertai budaya kemiskinan dalam pandangan Lewis berupa perasaan terpinggirkan yang kuat, ketidakberdayaan, ketergantungan, dan rendah diri. Ciri-ciri ini, termasuk dalam kelompok dan secara fungsional terkait dalam setiap kelompok, ada juga banyak hubungan antar kluster. Ciri-ciri yang diambil

secara individual, tidak mewakili budaya kemiskinan, tetapi pola dan hubungannya. Hubungan antara sifat dapat berbeda dari masyarakat ke masyarakat, dari keluarga ke keluarga. Singkatnya, budaya kemiskinan adalah adaptasi dan reaksi orang miskin terhadap posisi marjinal mereka dalam masyarakat kapitalistik yang terstratifikasi kelas dan sangat individual. Oleh karena itu, mengakhiri situasi kemiskinan tidak berarti mengakhiri budaya kemiskinan. Dengan kata lain, meski situasi kemiskinan berubah, masyarakat tidak cepat lepas dari perilaku yang sudah lama beradaptasi dengan situasi mereka sebelumnya selama bertahun-tahun.

Menurut Lewis (1966), pengertian kemiskinan adalah suatu budaya yang terjadi karena penderitaan ekonomi (*economic deprivation*) yang berlangsung lama. Budaya kemiskinan adalah suatu cara yang dipakai oleh orang miskin untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap posisi mereka yang marginal dalam masyarakat yang memiliki kelas-kelas dan bersifat individualistik dan kapitalistik. Lewis menggambarkan budaya kemiskinan sebagai cara hidup, kombinasi dari sifat-sifat tertentu, yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini adalah adaptasi terhadap kemiskinan, untuk "berada di bawah" dalam masyarakat kapitalis industrialisasi/-ed, tetapi mengabadikan dirinya sendiri begitu dimulai. Ini melintasi batas-batas nasional dan etnis, tetapi memiliki rasa yang berbeda dalam situasi yang berbeda.

Pandangan Lewis ini juga dijelaskan oleh Baker (1980), yang mengemukakan bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari sudut ekonomi saja karena kemiskinan ternyata berkaitan dengan berbagai aspek diantaranya aspek sosial budaya dikarenakan persoalan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan budaya.

Dalam dimensi sosio-kultural, kemiskinan memang tidak dapat dihitung dengan angka-angka, namun muncul dalam bentuk budaya kemiskinan. Lewis, dalam (Djamaludin Ancok, 1995) misalnya, menyatakan adanya respon tertentu yang dilakukan oleh masyarakat miskin dalam menyikapi hidup, seperti boros dalam membelanjakan uang, mudah putus asa, merasa tidak berdaya, dan apatis. Walaupun tidak seluruhnya benar, kondisi yang demikian itu juga dialami oleh masyarakat nelayan. Kecenderungan untuk membeli barang-barang konsumtif pada saat banyak ikan hasil tangkapan yang diperoleh paling tidak telah mendukung kebenaran tesis yang dikemukakan oleh Lewis tersebut. Kecenderungan semacam itulah yang oleh sementara pihak dipandang sebagai sikap boros, karena tidak menyimpan kelebihan uangnya untuk tabungan yang bias digunakan pada saat musim paceklik. Begitu pula sikap apatis terhadap program-program pemerintah juga melanda

kehidupan nelayan, karena terlalu sering dieksploitasi oleh pihak luar untuk kepentingan mereka. Akibatnya mereka sulit untuk percaya terhadap program-program yang diperkenalkan, baik itu oleh pemerintah ataupun oleh pihak lain, kecuali sudah terbukti membawa manfaat bagi mereka. Ini terjadi karena banyak program yang selama ini tidak membawa implikasi bagi perbaikan ekonomi mereka. Perasaan tidak berdaya juga muncul di kalangan ini, terutama dalam menghadapi ulah para pedagang ikan yang menentukan harga secara sepihak. Faktor kultur juga cukup mempengaruhi etos kerja para nelayan, misalnya gaya hidup boros, pemanfaatan waktu yang tidak efektif, cepat puas dengan hasil yang dicapai hari ini, tidak punya tabungan dan masih mempercayai hal yang tabuh dan pantang dalam proses melakukan penangkapan ikan.

Dalam hal diversifikasi penangkapan ikan, Kusnadi, (2002), mengemukakan bahwa nelayan tidak dapat melakukan diversifikasi dalam penangkapan ikan karena hal ini membutuhkan keahlian tertentu yang diperoleh melalui proses yang panjang dan modal yang cukup besar. Misalnya, seorang nelayan sampan pancingan ketika sedang tidak musim ikan tongkol, cakalang dan layang, ia tidak akan mudah mengalihkan pekerjaannya untuk menjadi nelayan udang. Baik metode penangkapan maupun fasilitas yang digunakan untuk menangkap jenis ikan yang berbeda itu tidak sama. Masing-masing kristalisasi keahlian membutuhkan proses belajar yang lama. Oleh karena itu, diversifikasi

pekerjaan penangkapan ikan (kenelayanan) sangat sulit dilakukan dan beresiko tinggi. *Kedua*, adalah keterbatasan sumberdaya. Keterbatasan sumberdaya ini menyangkut sumberdaya manusia nelayan sendiri serta sumberdaya modal keuangan yang tidak ada, atau tidak memadai untuk mampu melakukan usaha penangkapan ataupun usaha lain yang lebih menguntungkan. Wawasan dan pengetahuan para nelayan kecil ini relatif terbatas sekitar dunia melaut saja, hal-hal diluar pekerjaan sehari-hari tidak mereka ketahui. Hal ini tidak lepas dari tingkat pendidikan mereka yang juga relatif rendah, dimana sebagian besar hanya sampai sekolah dasar bahkan tidak lulus. Dalam hal ketrampilan kerja, para nelayan kecil ini juga terbatas, sementara pekerjaan lain selain menangkap ikan di laut tidak banyak mereka kuasai. Hal demikian selain juga karena tingkat pendidikan yang rendah, kemampuan mobilitas mereka di daratan yang memungkinkan untuk memperoleh pengalaman baru juga rendah. Rutinitas kegiatan sehari-hari para nelayan kecil tersebut umumnya hanya pergi melaut, dan setelah pulang mengisi waktu istirahat mereka dengan memperbaiki alat tangkap yang rusak, tidur malam hari terus besoknya melaut lagi. Terbatasnya ketrampilan yang dimiliki para nelayan kecil selain masalah melaut inilah yang menjadikan diversifikasi usaha non perikanan di kalangan rumah tangga nelayan tidak mudah berjalan. Meski usulan program diversifikasi usaha sebagai upaya mengatasi kemiskinan rumah tangga nelayan banyak disampaikan, tetapi tidak mudah untuk bisa dilaksanakan. Pola-pola pekerjaan sebagai nelayan membatasi

aktivitas ke sektor pekerjaan lain. Dalam hal kemampuan modal keuangan yang dimiliki rumah tangga nelayan kecil juga terbatas, bahkan sebagian dari mereka sama sekali tidak punya. Keterbatasan kepemilikan aset merupakan ciri umum masyarakat miskin termasuk pada nelayan yang antara lain tergambar dari kondisi rumah, alat-alat rumah tangga yang sederhana, lingkungan tempat tinggal yang kumuh serta terlilit utang. *Ketiga*, pandangan hidup yang berorientasi akhirat saja. Faktor pandangan hidup yang ada pada rumah tangga nelayan adalah suatu pandangan yang lebih berorientasi pada kehidupan di akhirat nanti, sedangkan keseharian di dunia biarlah berjalan apa adanya, tidak perlu terlalu dipikirkan dengan berat tetapi santai saja, menikmati apa yang ada. Karena menurut mereka kaya ataupun miskin itu adalah suatu yang deterministik atas kewenangan distribusi dari Tuhan. Dalam menjalani hidup rumah tangga nelayan miskin tersebut tampak terkungkung dalam kultur yang tidak kondusif untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan. Sikap menerima, tunduk, patuh dan hormat kaum miskin dihadapan kaum kaya itu sesungguhnya merupakan siasat teatrikal yang menyembunyikan kedongkolan, iri hati dan dengki, Scott (1990) dalam (Siswanto, 2008). Untuk menghindari resiko hilangnya pekerjaan, distribusi pemberian dari pedagang cap “tidak tahu terima kasih” dan lain-lain, nelayan memilih mengurangi atau menyembunyikan ekspresi resistensi, gunjingan, sinisme, atau kecurangan yang ia tujukan pada pedagang. Walaupun tidak dikurangi, aksi-aksi itu tidak pernah ditunjukkan secara frontal atau

terang-terangan di hadapan pedagang. Akibatnya pedagang sering memberi lebih tidak menjadi sasaran atau mengalami ekspresi resistensi nelayan dibandingkan yang pelit dan kasar.

Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah memiliki struktur relasi sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis jenis kelamin (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku konsumtif. Seperti juga masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, social dan ekonomi yang kompleks, (Kusnadi, 2009). Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum bersungguh-sungguh, persoalan sosial ekonomi dan budaya yang terjadi pada masyarakat nelayan cukup kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Nelayan termasuk salah satu golongan miskin yang perlu diperhatikan. Karena selalu berada pada kehidupan ekonomi yang rendah dengan situasi kerja yang monoton dan dalam melakukan pekerjaan memerlukan fisik yang kuat.

4. Faktor Demografi

Permasalahan kemiskinan dalam tinjauan demografi sangat terkait erat dengan kondisi kependudukan suatu wilayah. Dalam hal ini penduduk merupakan salah satu aspek penting yang memiliki peran sentral dalam

pembangunan. Oleh karena itu jika pertumbuhan penduduk dalam satu kawasan tidak terkendali dengan baik, akan berpengaruh pada timbulnya berbagai permasalahan social, ekonomi dan budaya. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Menurut Budiharjo (2003), bahwa jumlah penduduk yang terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan lapangan atau kesempatan kerja yang memadai akan memicu naiknya tingkat kemiskinan. Percepatan pertumbuhan penduduk akan berimplikasi pada kondisi perekonomian suatu kawasan, yang menurut Malthus (1798) dalam Arsyad, (2015), menyatakan bahwa pertumbuhan populasi justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya justru akan memperkecil pendapatan perkapita. Pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan dan bagi pembangunan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi oleh dukungan ruang ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilan secara keseluruhan.

Menurut Malthus (1798) dalam (Conway, 2015) mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu; *Pertama*, penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi; *Kedua*, manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh

lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur). Lebih lanjut Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan per kapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas subsisten.. Sedangkan David Ricardo dalam (Arsyad, 2015), menjelaskan bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami keterhambatan (*statonary state*) sehingga akan berdampak juga pada penurunan tingkat kesejahteraan mereka. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan, Puspita (2015), menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa kependudukan merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional, antara lain adalah; *Pertama*, kependudukan, atau dalam hal ini adalah penduduk, merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu orientasi pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif

dalam dinamika pembangunan tersebut. *Kedua*, kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan, Pramana, (2017).

Ketika kehidupan masyarakat nelayan dihadapkan dengan kawasan pesisir laut yang menyimpan dan memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, maka hal tersebut menuntut sejumlah persyaratan bagi masyarakat setempat dalam pemanfaatan dan pengelolaannya. Disinilah peran pendidikan dan keterampilan menjadi salah satu penentu bagi kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi laut. Namun pada kenyataannya secara umum masyarakat nelayan yang tinggal disepanjang garis pantai Indonesia yang kurang lebih sepanjang 81.000 Km², rata-rata tingkat pendidikan dan keterampilan yang mereka miliki relative sangat rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan dengan kemiskinan, karena menurut Nurbayani (2018), jika kualitas sumber daya manusia rendah maka akan menyebabkan rendahnya produktivitas, dan akhirnya menyebabkan rendahnya pendapatan. Sebaliknya jika kualitas sumberdaya manusianya tinggi maka produktivitasnya akan tinggi dan akan meningkatkan pendapatan.

Berkaitan dengan perkembangan penduduk di suatu kawasan, apalagi kawasan pesisir laut, maka laju pertumbuhan penduduk yang ditandai dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga adalah suatu faktor penting yang juga mempengaruhi kemiskinan rumah tangga nelayan. Faktor ini dapat berimplikasi pada kemiskinan dalam dua arah; *Pertama*, mungkin secara langsung mempengaruhi kemiskinan, selama pendapatan rumah tangga tetap, meningkatnya jumlah keluarga akan menekan tingkatan konsumsi riil anggota keluarga. *Kedua*, sekalipun tiap anggota rumah tangga mempunyai pendapatan, pendapatan perkapita dapat menurun dengan bertambahnya jumlah keluarga berkenaan dengan *diminishing marginal*, (Nirbayani, 2018). Sementara itu perkembangan jumlah penduduk harus di ikuti oleh ketersediaan ruang kawasan yang memadai dan memungkinkan masyarakat yang tinggal di kawasan itu dapat melakukan aktifitas ekonomi dan jenis aktifitas lain agar masyarakat dapat bertahan dalam menjalani kehidupannya.

D. Strategi Bertahan Hidup

Manusia seperti makhluk lainnya, mempunyai naluri untuk mempertahankan hidupnya dan hidup lebih lama. Usaha ini dikendalikan oleh aturan pokok dari hidup yaitu, hidup dalam situasi apapun dengan lebih berkualitas daripada sebelumnya. Ini adalah ide dasar dari strategi bertahan hidup. Bagaimanapun, untuk meraih tujuan ini seseorang harus menetapkan banyak taktik untuk hidup. Widiyanto (2009) mengemukakan bahwa:

“Secara umum strategi bertahan hidup (survival strategy) didefinisikan sebagai tindakan ekonomi yang disengaja oleh rumah tangga dengan motivasi yang tinggi untuk memuaskan sebagian besar kebutuhan dasar manusia, paling tidak pada level minimum, sesuai dengan norma sosial dan budaya masyarakat”.

Sejalan dengan pertumbuhan manusia sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kebutuhan yang semakin banyak dan beranekaragam. Kebutuhan-kebutuhan hidup tersebut dipenuhi dengan baik apabila adanya pendapatan yang mendukung. Namun tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh setiap keluarga, terutama bagi keluarga yang memiliki standar ekonomi lemah. Tidak dapat dipungkiri bahwa manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada berbagai masalah baik itu masalah sosial maupun masalah ekonomi.

Untuk mengatasi masalah ekonomi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup dibutuhkan berbagai strategi. Suharto (2003) menyatakan cara atau strategi bertahan hidup (*Coping Strategy*) yang dilakukan keluarga miskin dalam perekonomian, dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: (a) Strategi aktif, yakni strategi mengoptimalkan segala potensi keluarga untuk mengatasi guncangan ekonomi dengan menambah jam kerja dari biasanya karena tuntutan hidup yang semakin besar, selain itu juga dengan melibatkan anggota keluarga untuk ikut bekerja agar dapat membantu kehidupan sehari-hari mereka, seperti melibatkan istri dan anak-anak; (b) Strategi pasif, yakni strategi penekanan ataupun mengurangi pengeluaran-pengeluaran keluarga seperti pengeluaran biaya untuk sandang, pangan, biaya sosial,

transportasi, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari lainnya; dan (c) Strategi jaringan yakni strategi yang mencakup dalam menjalin relasi atau jaringan, baik secara formal maupun informal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan. Seperti meminjam uang ke tetangga, memanfaatkan program kemiskinan dan sebagainya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun dengan berpijak pada pendapat para ahli yang menelaah masalah kemiskinan masyarakat nelayan dari sudut pandang kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan demografi. Dari keempat aspek kehidupan nelayan ini, peneliti melakukan penelaahan pada unsur-unsur mana saja yang menyebabkan terjadinya kemiskinan seumur hidup dan faktor ekonomi, sosial, budaya dan demografi apa saja yang secara holistik dan terintegrasi menjadi penyebab terjadinya kemiskinan berkelanjutan, serta bagaimana masyarakat nelayan memberi makna atas kemiskinan itu.

Dalam bukunya *La Vida*, Oscar Lewis (1966) mengemukakan bahwa perlu diadakan pembedaan antara situasi dan kondisi miskin dengan kebudayaan miskin. Kebudayaan miskin yang ciri-cirinya adalah rendahnya partisipasi anggota kelompok ini dalam pranata-pranata utama dari masyarakat luas, minimnya organisasi pada keluarga-keluarga mereka, hilangnya masa kanak-kanak sebagai suatu tahapan panjang dan terlindungi dalam lingkaran kehidupan mereka, serta perasaan tidak berdaya, fatalism, ketergantungan dan rasa rendah diri. Kebudayaan

kemiskinan ini, menurut Oscar Lewis diproduksi dan direproduksi lagi didalam generasi berikutnya, karena hal itu biasanya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan kemiskinan pada akhirnya membawa dampak pada situasi melestarikan kondisi miskin itu sendiri.

Dalam penelitian ini konsep kemiskinan seumur hidup sebagai kebudayaan kemiskinan yang menempatkan nelayan berada pada situasi atau kondisi miskin. Hidup dalam kondisi miskin merupakan sebuah implikasi aktifitas ekonomi nelayan. Kusnadi (2003) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan nelayan karena faktor eksternal yakni kondisi yang berasal di luar nelayan, sedangkan faktor internal berasal dari dalam diri (sumberdaya) nelayan. Adapun faktor internal penyebab kemiskinan dalam penelitian ini adalah wawasan ekonomi nelayan yang rendah, ketergantungan pada struktural, berdamai dengan kehidupan miskin, dan peningkatan penduduk yang pesat. Sedangkan faktor eksternal yakni kondisi lingkungan laut yang mempersulit penangkapan, sistem pemasaran hasil tangkapan, distribusi hasil yang tidak merata pada organisansi nelayan dan kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada nelayan.

Meskipun hidup dalam kondisi miskin, nelayan Laeto Selatan dan Laeto Utara Kota Gorontalo dalam mengatasi kesulitan hidup, selalu berupaya dengan berbagai strategi mendapatkan bantuan dari juragan, kerabat dan pemerintah namun upaya-upaya ini hanya menjadikan kemiskinan itu menjadi langgeng atau berkelanjutan sehingga kemiskinan

direproduksi terus menerus dari generasi ke generasi.

Untuk melihat dan menggambarkan pada unsur-unsur apa saja terjadinya kemiskinan berkelanjutan dan respon budaya sebagai strategi bertahan hidup miskin seperti spirit hidup (nilai budaya), relasi dengan negara dan alternatif pekerjaan lain sebagaimana dalam pandangan Lewis (1958), maka peneliti melakukan penelaahan terhadap faktor ekonomi, sosial, budaya dan demografi guna mengkaji lebih jauh faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan yang selanjutnya akan dimuat dalam narasi antropologi secara holistik dan terintegratif menyebabkan kemiskinan nelayan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini diilustrasikan dalam skema kerangka konseptual berikut ini:

SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

